



**PUTUSAN**  
**Nomor 342 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ASNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **AHMAD NAWAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pekerjaan Tani;

Dalam hal ini diwakili oleh Habibuddin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Habib, S.H., & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 April 2019;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam;  
Dalam hal ini diwakili oleh Sujono, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 382/SK-12.07/IV/2018, tanggal 23 April 2018;

**Termohon Kasasi I;**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 342 K/TUN/2019



II. **WAHYUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh Lindung Pandiangan, S.E., S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia Sumatera Utara (LBH Ferari Sumut), beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2019;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Tumpatan Nibung, tanggal 21 November 2016, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 345/Tumpatan Nibung/2016, tanggal 22 September 2016 luas tanah 4569 M<sup>2</sup>, atas nama Wahyuddin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Tumpatan Nibung, tanggal 21 November 2016, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 345/Tumpatan Nibung/2016, tanggal 22 September 2016 luas tanah 4569 M<sup>2</sup>, atas nama Wahyuddin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:



1. Tentang kompetensi *absolut*;
2. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak punya kapasitas melakukan gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Tumpatan Nibung;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tentang kompetensi *absolut*;
2. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak punya kapasitas melakukan gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Tumpatan Nibung;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 58/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 5 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 20/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2019, dan kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 20/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 27 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 58/G/2018/PTUN.MDN. 58/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 5 November 2018;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membebaskan ongkos perkara kepada Terbanding/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Mei 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara kerugian Penggugat I dan Penggugat II yang masing-masing telah mendalilkan memiliki tanah *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah dengan ganti rugi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo*, namun demikian tidak terdapat alas hak yang menunjukkan adanya peralihan hak dari Almarhum Ibrahim kepada Penggugat I, serta adanya perbedaan letak tanah antara alas hak Penggugat II dengan letak tanah dalam keputusan objek sengketa,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 342 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. ASNAH,**  
**2. AHMAD NAWAWI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 342 K/TUN/2019

